

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Penelitian dengan judul “Produksi Ruang Ekonomi: *Konflik Antar Aktor dalam Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus JIPE di Kabupaten Gresik*”, berupaya untuk menguraikan adanya penambahan produksi ruang ekonomi di Kabupaten Gresik tepatnya di Kecamatan Manyar, yang awal mulanya memiliki status kawasan industri dan beralih menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam proses penetapan ruang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), konflik dilatarbelakangi dengan aksi demonstrasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau dikenal sebagai Forkot (Forum Kota) Gresik. Keberadaan Forkot yakni sebagai bentuk respon penolakan terhadap peralihan Kawasan Industri JIPE menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Berdasarkan aksi tersebut, konflik antar aktor saling bersinggungan seiring berjalannya waktu. Penulis juga menemukan fenomena bahwasannya lokalisasi kekuasaan berperan penting dalam proses penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik.

Fenomena lokalisasi kekuasaan menjelaskan bawasannya aktor-aktor yang terlibat memiliki kecenderungan dengan elit-elit politik lokal, dibuktikan dengan pergerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dalam internalnya memiliki satu bendera tertentu untuk menyuarakan aspirasinya yakni PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Selain itu, salah satu pengurusnya terlibat dalam pemilihan calon legislatif pada 2019 silam, walaupun memiliki kekurangan suara pemilih dengan partai pengusung PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Secara tidak langsung, proses pembentukan ruang baru telah menampilkan arena pertarungan elit lokal di Gresik untuk memperebutkan sumberdaya. Calon bos lokal menempatkan elit dalam masyarakat sipil, sehingga dapat bersinggungan langsung antara permasalahan negara dengan masyarakat. Indikasi konflik yang termanifestasi salah satunya muncul dalam Pilkada Gresik pada tahun 2019. Melihat basis massa Forum Kota (Forkot) yang sudah memiliki bendera

atau organisasi sendiri, Penulis beranggapan bahwasannya dalam Pemilihan Kabupaten Daerah 2019 menjadikan Forum Kota (Forkot) Gresik sebagai instrumen yang digunakan, terlepas dari peranan Forum Kota (Forkot) yang bersifat melakukan kritik secara masif terkait sosial-politik, dan kultural melalui aksi yang dilakukan untuk merespon kebijakan publik yang dirasa merugikan masyarakat lokal Gresik.

Aksi dalam proses penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIPE, bermula pada adanya informasi bahwa terdapat dokumen dan berkas yang akan diajukan ke pusat yakni Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Penolakan tersebut didasarkan atas segala pertimbangan oleh Forkot Gresik, dikhawatirkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat mengakibatkan efek negatif dan yang berdampak yakni warga Gresik. Selain itu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dinilai sebagai suatu produk pembangunan yang hanya menguntungkan pihak asing dan pemodal besar, yang nantinya berimplikasi pada pengurangan pendapatan daerah, mengancam hak-hak buruh, hingga mengancam keberadaan dan kelestarian lingkungan hidup (Anonim, 2020). Melalui tuntutan yang diuraikan oleh forkot Gresik, pemerintah kabupaten Gresik melakukan berbagai upaya dalam suksesi dan maksimalisasi pertumbuhan ekonomi, dengan *hearing* dan audiensi. Tanpa diketahui, terbentuklah peresmian Kawasan Ekonomi Khusus *Java Integrated Industrial Port Estate* di Kabupaten Gresik dalam Peraturan Pemerintah (No 71 tahun 2021) oleh Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Anggreati, 2021).

Pasca pelaksanaan peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), aksi demonstrasi yang telah dilakukan secara masif oleh Forkot Gresik mulai meredam dan liputan berita terkait penolakan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sudah tidak terlihat. Pada aksi lanjutannya, Haris sebagai koordinator aksi telah menyatakan bahwasannya adanya pembohongan publik yang dilakukan oleh JIPE dan Pemerintah Gresik. Hal ini dibuktikan dengan adanya, simpang siurnya informasi oleh pihak JIPE yang menyatakan bahwasannya pengajuan kawasan ekonomi

husus merupakan usulan dari Pemerintah. Sedangkan, ketika melihat bukti administrasi yang masuk ke DPRD, surat pengajuan tersebut berasal dari JIPE (Anonim, 2019). Maka dari itu konflik atas meredamnya aksi demonstrasi oleh Forkot Gresik pasca peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini perlu dikaji lebih dalam didukung dengan proses audiensi lanjutan yang lebih membahas mengenai analisis dampak sosial masyarakat. Berdasarkan atas uraian faktor di atas, secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai pemantik konflik dalam penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan kata lain terdapat produksi ruang ekonomi baru.

Proses produksi ruang selalu berkaitan dengan konflik. Konflik bermula ketika terdapat perebutan sumber daya atau kepentingan akibat dari persinggungan antar aktor. Terlebih ketika produksi ruang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIPE merupakan salah satu proyek prestisius yang diproyeksikan mampu menarik para investor senilai 16,9 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 236 triliun (Alexander, 2021). Isu dampak sosial-masyarakat dalam pembentukan produksi ruang kawasan ekonomi khusus juga memberikan pihak pengembang langkah untuk menentukan titik target dalam hal pemenuhan serapan tenaga kerja. Pihak pengembang JIPE akan melibatkan warga Gresik dalam program serapan tenaga kerja yang mencapai 199.818 ketika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIPE sudah dapat dioperasikan secara penuh (Anonim, 2021). Dalam proses produksi ruang, antar aktor saling berkontestasi untuk memperebutkan kekuasaan dan kepentingan. Perebutan kekuasaan dan kepentingan acapkali mengabaikan taktik yang digunakan dengan tujuan memperoleh keuntungan baik secara sepihak maupun ditujukan kepada kepentingan kelompok masing-masing aktor.

Dalam perspektif ruang, fenomena kontestasi, negosiasi, konsensus, dan konflik di suatu wilayah dapat dipahami sebagai bentuk relasi kuasa dari aktor-aktor penataan ruang yang dalam prosesnya memiliki keterlibatan pemerintah, masyarakat dan pasar. Aktor pemerintah dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni pemerintah pusat seperti Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, dan

pemerintah daerah seperti Bupati Gresik hingga jajaran Pemerintah Kabupaten Gresik lainnya yang mendukung proses administrasi termasuk DPRD. Aktor masyarakat melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kepentingan seperti Forkot Gresik, masyarakat sekitar Manyar yang terdampak, dan masyarakat Gresik secara luas. Aktor pasar melibatkan JIPE sebagai kawasan, PT. BKMS (Berkah Kawasan Manyar Sejahtera), PT. AKR (Akra), PT. BJTI (Berlian Jasa Terminal Indonesia), PT. BMS (Berlian Manyar Sejahtera) sebagai pengembang kawasan industri, hingga investor.

Relasi antar tiga aktor ini nantinya dapat mempengaruhi praktik tata ruang. Melalui pendekatan sosio-spasial, keterlibatan pemerintah dengan kepentingan dan kemauan politiknya merupakan salah satu instrument untuk memacu pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah. Bentuk investasi atas tuntutan ekonomi global yang dilakukan yakni identik dengan perubahan ruang produksi di suatu wilayah khususnya pada kawasan ekonomi khusus JIPE, di mana JIPE sebelumnya sudah memiliki label kawasan industri modern dan dapat mempengaruhi setiap masyarakat hingga kehadiran investor maupun pengembang. Dengan proses tersebut, nantinya akan terciptanya pembangunan fasilitas umum, ruang publik, pembangunan gedung, dan lain sebagainya (Aminah, 2015).

Dalam produksi ruang kawasan ekonomi khusus, fenomena konflik dan kontestasi antar aktor tidak bisa dihindari melalui praktik tata ruang. Dalam gagasan (Lefebvre, 1991: 67), ruang dapat diartikan sebagai produk politik dan instrumen yang mengarah pada perubahan sosial ekonomi, sehingga ruang bersifat tidak netral dan pasif. Ruang ketika dilihat melalui kacamata produk politik akan mengakibatkan praktik tata ruang tidak lepas dari hubungan keberpihakan antar aktor yang memiliki wewenang dalam pembuatan regulasi tata ruang. Secara tidak langsung, keberpihakan akan suatu golongan untuk mencapai kepentingan tertentu, dapat dilihat melalui aktor yang membuat regulasi tersebut.

Di sisi lain, pemerintah kabupaten Gresik sebagai fasilitator dalam pembentukan produksi ruang kawasan ekonomi khusus dan pemangku wilayah, kurang menggerakkan pihak pengembang ditinjau melalui isu sosial masyarakatnya, khususnya tentang tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Melalui anggapan tersebut, Forkot Gresik dalam aksi demonstrasi nya mempertanyakan kembali keberadaan pemerintah Gresik yang menitikberatkan pada permasalahan tenaga kerja (Laily, 2021). Berdasarkan atas penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya produksi ruang erat kaitannya dengan proses terjadinya suatu konflik dan kontestasi yang melibatkan berbagai aktor untuk memenuhi kepentingan yang dimiliki, terutama di era pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Gresik.

Produksi ruang kawasan ekonomi khusus JIPE Gresik merupakan jawaban dari kebutuhan yang bertujuan dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian negara. JIPE sebagai salah satu kawasan terintegrasi pertama di Indonesia, dengan total area 3.000 hektar, dan terdiri dari pelabuhan umum multifungsi, hunian berkonsep kota mandiri dan kawasan industri, merupakan langkah alternatif dalam memanfaatkan akumulasi sumber daya manusia baik dari Kota Surabaya maupun dari Kabupaten Gresik itu sendiri. Langkah preventif tersebut secara tidak langsung dapat mereduksi kepadatan aktivitas dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke pelabuhan Gresik (Anonim, 2014). Proses reduksi kepadatan aktivitas dari perkotaan yang cukup padat ke daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi yakni fenomena aglomerasi. Selain itu, penetapan kawasan ekonomi khusus bukan hanya sebagai alternatif pelengkap saja, melainkan sebagai upaya maksimalisasi investasi yang diperkirakan masuk di tahun ke-20, dimana akan terciptanya pengembangan bisnis industri metal elektronik, energi, logistik dan kimia disebabkan kesediaan dan kesiapan fasilitas infrastruktur melalui kawasan dan penggagas kawasan ekonomi khusus JIPE yang cukup (Anonim, 2021).

Fenomena munculnya konflik antar aktor dalam produksi ruang kawasan ekonomi khusus ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di Pulau Belitung, tepatnya pada Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang, di mana proses perkembangannya juga memiliki berbagai hambatan, salah satunya yakni lahan yang menjadi tempat berdirinya kawasan ekonomi khusus tersebut, masih menjadi sengketa antara masyarakat setempat dengan perusahaan dari Belitung Maritime selaku konsorsium pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang. Dalam penelitian (Rizalsan & Juwono, 2020). Penulis menguraikan beberapa perusahaan yang terlibat yakni PT Belitung Pantai Intan (PT Belmi), PT Nusa Kukila, dan PT Tanjung Kasuarina. Resolusi konflik yang terjadi yakni dengan dilakukannya pembentukan Tim Tri Partit, yang terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat, dan PT Belitung Pantai Intan, dimana tim ini berupaya untuk mengumpulkan fakta yang sesuai di lapangan untuk menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan Konsorsium Belitung Maritime. Di sisi lain, pemerintah beserta jajaran birokrasi Provinsi Bangka Belitung secara perlahan sudah merespon kebutuhan masyarakat, khususnya tentang pemberdayaan masyarakat dan edukasi.

Terlepas melalui fenomena yang terdapat di Belitung, hal ini juga terjadi di Lombok Tengah tepatnya di Desa Kute pada Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Berdasarkan penelitian (Arham, 2021), penulis menguraikan beberapa temuan bahwasannya proses perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika tidak sebanding dengan klaim positif yang berasal dari pemerintah, yang lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dalam kajiannya, konflik atas ruang kawasan ekonomi khusus masih berselisih khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat, seperti halnya: kerugian atas hilangnya tanah, larangan untuk berjualan di kawasan, kehilangan lahan atas tanah ulayat mereka hingga mengorbankan nilai-nilai tradisional yang ditanamkan. Hal tersebut dapat menyebabkan konflik semakin meluas dengan adanya keterbukaan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Peneliti juga menguraikan bahwasannya dalam proses maksimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan tentang lingkungan hidup masih kurang. Berdasarkan atas dua fenomena

yang diangkat, peneliti berupaya untuk mengangkat topik penelitian yang terjadi di Gresik, mengingat konflik antar aktor masih menjadi pertanyaan hingga saat ini khususnya terkait analisis dampak sosial masyarakat.

Letak penetapan ruang produksi dalam penelitian ini sebagai kasus, dan perspektif konflik akan direfleksikan sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan fenomena lokalisasi kekuasaan juga berperan sebagai pisau analisis lanjutan yang menekankan bahwasannya dalam produksi ruang, aspek politik juga mengakar pada kekuasaan elit-elit lokal yang memiliki kepentingan yang beragam sehingga persinggungan tersebut menimbulkan konflik. Sumber daya negara dijadikan sebagai kekuatan politik, dan Forum Kota (Forkot) Gresik dijadikan sebagai instrumen dalam memenuhi kepentingan politik lokalnya. Maka dari itu, Penulis menyatakan bahwasannya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Forum Kota (Forkot) Gresik bukan berasal dari masyarakat genuine dari bawah ke atas, melainkan terdapat indikasi kepentingan kekuatan elit. Konflik dalam kasus produksi ruang memiliki pro dan kontra yang beragam, sehingga menimbulkan proses yang menguntungkan sepihak. Konflik antar aktor juga bersinggungan satu dengan yang lainnya untuk memperebutkan sumber kekuasaan sebagai tujuan masing-masing pemilik kepentingan. Hubungan tata ruang dengan studi ilmu politik yakni terletak pada keberadaan ruang yang di dalamnya memiliki karakteristik interaktif oleh investor/ kapitalis (pengusaha), negara (pemerintah), dan masyarakat. Aktor sebagai tokoh konflik menitikberatkan pada masyarakat dengan tujuan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, tanpa mengurangi kesejahteraan sosial masyarakatnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kondisi terkait produksi ruang dalam proses penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, khususnya di kecamatan Manyar merupakan peristiwa yang erat kaitannya dengan konflik antar aktor pemilik kepentingan. Peneliti berupaya untuk menguraikan poin-poin problematik, yakni respon aktor atas konflik yang terjadi, ditinjau pada saat aksi demonstrasi berlangsung mulai tahun 2018 hingga 2020.

Pada saat aksi, Pihak JIPE merespon tuntutan yang ditekankan oleh Forkot Gresik, terbukti selalu mengulangi pernyataan bahwasannya Kawasan Ekonomi Khusus ditujukan untuk menarik investor. Sementara itu, tuntutan Forkot Gresik lebih menitikberatkan pada solusi serapan tenaga kerja bukan terkait keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus. Ketika ditinjau melalui respon pemerintah, Edy selaku Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lebih mengutamakan kelengkapan berkas untuk diajukan ke Pusat, selebihnya tuntutan atas aksi Forkot Gresik hanya dijadikan sebagai bahan diskusi.

Perselisihan antar aktor juga terjadi ketika Forkot Gresik mempertanyakan siapa yang mengajukan KEK. Pihak JIPE menguraikan bahwasannya Pemkab lah yang mengajukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke Pusat. Namun, setelah dicari dalam dalam surat administrasi, berkas yang masuk berasal dari JIPE. Maka dari itu Forkot mengasumsikan bahwasannya ada pembohongan publik. Setelah mengajukan tuntutan dalam kelima aksi, penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIPE tertuang langsung dalam PP No. 71 Tahun 2021 pada tanggal 28 Juni 2021. Setelah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIPE diresmikan, Forkot Gresik tidak mengajukan tuntutan kembali.

Berdasarkan atas latar belakang masalah di atas, hal ini merujuk pada pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1.2.1. Mengapa konflik terjadi dalam proses reproduksi ruang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIPE di Gresik?
- 1.2.2 Bagaimana peranan aktor dalam proses eskalasi konflik Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIPE di Gresik ketika ditinjau melalui fenomena lokalisasi kekuasaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Melalui rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:



1.3.1 Untuk mengetahui alasan terjadinya konflik dalam penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIPE di Gresik.

1.3.2 Untuk mengetahui peranan aktor dalam proses eskalasi konflik dalam penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIPE di Gresik ditinjau melalui fenomena lokalisasi kekuasaan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

- a. Memberikan kontribusi sumbangsih pemikiran dalam penelitian yang berfokus pada studi tentang konflik antar aktor dalam penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik sebagai proses produksi ruang ekonomi.
- b. Memperluas perspektif terkait produksi ruang, dimana dalam praktiknya menjelaskan bagaimana aspek politik dan bagaimana fenomena lokalisasi kekuasaan terjadi dalam proses reproduksi ruang dalam penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Gresik.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Menambah informasi bagi pihak yang mempunyai ketertarikan akan kajian studi tentang konflik ditinjau melalui produksi ruang.
- b. Menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik tentang konflik ditinjau melalui produksi ruang.

## **1.5 Kerangka Konsep**

### **1.5.1 Ruang**

Menurut Lefebvre, ruang dapat diartikan sebagai produksi sosial. Kedudukan ruang berkaitan erat dengan ruang bersama (*common space*), dimana dalam kedudukan ruang adanya keterlibatan kepentingan antar pihak untuk menjalin relasi melalui produksi maupun reproduksi ruang yang sifatnya kapitalistik. Melalui pernyataan di atas, produksi ruang secara spasial nantinya akan berhubungan dengan produksi ruang sosial atau relasi produksi yang di dalamnya mencakup ruang secara spasial dengan masyarakat. Hal ini juga dapat dikatakan bahwasannya produksi ruang, baik

spasial maupun sosial selalu memiliki korelasi yang erat dengan perkembangan produksi atau *mode of production*, dimana hal ini bertujuan untuk memahami konstruksi atas ruang atau esensial dalam adanya perkembangan kapitalisme (Lefebvre, 1991: 26-28).

Melalui produksi sosial tersebut, mulai adanya proses pembentukan ruang sosial yang disebabkan oleh berbagai tindakan sosial yang dilakukan oleh individu maupun kolektif. Hal ini disebabkan, ruang sosial nantinya akan berkaitan dengan jaringan yang menghubungkan aktivitas-aktivitas sosial, seperti halnya; pekerjaan, kehidupan pribadi (*private life*), serta waktu luang (*leisure*) (Lefebvre & Harvey, 1991: 38). Hal ini dapat disederhanakan kembali, bahwa terdapat korelasi yang bersifat dialektis antar ruang dalam hidup, baik ruang yang dipersepsikan dan ruang yang dikonsepsikan. Ditinjau melalui produksi ruang, suatu ruang sosial dihasilkan dalam bentuk tiga rangkaian konseptual atas ruang. Pertama, praktik spasial di mana praktik ini lebih memfokuskan pada produksi serta reproduksi hubungan spasial baik melalui objek maupun produk.

Praktik ini nantinya akan menjamin proses berlangsungnya keberlanjutan dalam produksi ruang sosial, disebabkan terdapat tinjauan lebih melalui subjek atau seseorang tentunya memiliki keterikatan terhadap kepemilikan atas ruang. Kedua, representasi ruang, dimana konsep ini lebih menitikberatkan pada pola hubungan produksi dan suatu tatanan, yang tentunya memiliki tujuan untuk memaksakan suatu pola tertentu atas pemakaian suatu ruang. Oleh karena itu, konsep kedua ini lebih memfokuskan pada dinamika yang ada pada proses tersebut. Ketiga, ruang representasional, dimana konsep ini lebih terlihat pada penggunaan ruang sebagai bentuk pemenuhan simbol-simbol, dimana orang-orang di dalamnya saling melakukan interaksi, baik melalui individu, kelompok, atau suatu masyarakat (Lefebvre, 1991: 38-40).

Dalam pandangan Harvey, kedudukan ruang dan waktu langsung diakumulasi sebagai suatu proses ekonomi kapital, dimana terdapat strategi kekuasaan ekonomi

yang berkelanjutan dengan memanfaatkan ruang untuk memenuhi kepentingan antar kelompok di bawah tujuan perekonomian negara (Harvey et al., 2010). Berdasarkan atas kedua pandangan di atas, produksi ruang sosial menurut Lefebvre yang menekankan bahwa keberadaan ruang didasarkan atas keterlibatan masyarakat dengan ruang spasial lainnya, yakni relevan dengan topik produksi ruang ekonomi. Peneliti memilih diksi produksi ruang ekonomi tidak lain disebabkan oleh perkembangan ruang erat kaitannya memanfaatkan kepentingan dan memenuhi sumber daya yang dapat diperoleh, yang sifatnya kapitalistik. Sedangkan, konsep ruang dan waktu oleh Harvey juga sebanding dengan tujuan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus JIPE, dimana adanya kepentingan untuk memenuhi proses ekonomi kapital yang berkelanjutan dan terdapat proses perdagangan dengan dalih peningkatan perekonomian suatu daerah di dalamnya.

### **1.5.2 Konflik**

Perspektif konflik antar aktor dapat menjadi persoalan politik. Hal ini disebabkan berbagai kelompok kepentingan berlomba untuk memperebutkan sumber daya yang dibutuhkan. Keterlibatan dua orang atau lebih dan terikat dalam isu yang dipertentangkan merupakan isu publik, di mana kepentingan tersebut menyangkut orang banyak, baik negara, pasar hingga masyarakat (Rauf, 2001: 19-20). Pada kasus ini, negara memegang kekuasaan tertinggi mulai dari regulasi, penetapan kewenangan pemerintah, hingga proses administrasi yang membantu sukses penetapan kawasan, dengan adanya keterlibatan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pasar sebagai pelaku usaha yang dikenal dengan pihak pengembang memiliki sumber-sumber yang akan dijual belikan atas dasar negara sehingga adanya peningkatan keuntungan dalam produksinya. Sedangkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku dan pengguna fasilitas yang telah disediakan.

Kilas balik di abad kesembilan belas tentang pemahaman konflik salah satunya diangkat oleh Karl Marx, di mana awal mulanya beliau mengembangkan analisis politis dan ekonomis ditinjau melalui asumsi bahwasannya konflik merupakan

suatu proses yang terelakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan oleh konflik yang sifatnya merusak. Marx dalam materialisme dialektikanya menyimpulkan bahwasannya dengan adanya konflik, nantinya akan mendorong konflik yang berkelanjutan dan perubahan selalu tidak dapat dihindari. Secara tidak langsung, Marx mengungkapkan bahwa konflik dapat menimbulkan konsekuensi yang bisa bersifat merugikan maupun menguntungkan. Di sisi lain, Marx juga menganggap salah ketika suatu interaksi harus melibatkan konflik di dalamnya, dikarenakan ketika konflik tersebut sudah terjadi kemungkinan penyelesaian lebih sering dan dapat memuaskan berbagai pihak (Pruitt, 2004: 12-14).

### **1.5.3 Elite Politik**

Dalam elit politik, terdapat keberadaan Pareto dan Mosca dalam praktik politiknya. Maka terdapat tinjauan kembali terkait “siapa yang disebut sebagai elit?”. Dalam hal ini, Pareto dan Mosca dapat disebut sebagai teoritisasi elit, di mana teoritisasi elit terdiri dari elit itu sendiri (memerintah dan non memerintah), dan non elit. Elit didefinisikan sebagai sekelompok minoritas yang memiliki keunggulan, keunikan, atau ciri khas dalam hal (kekayaan, tanah, uang, pengetahuan, gelar, simpanan, dan sebagainya). Dalam perspektifnya, Pareto melihat mengapa rakyat diatur oleh elit dan patuh dengan elit. Elit menurut Pareto dapat digambarkan ketika seorang elit berkuasa, maka harus menggunakan cara yang menyerupai rubah dan singa. Rubah dalam pandangan Pareto menitikberatkan pada, kelicikan, penuh intrik, dan diplomatis. Singa dalam pandangan Pareto lebih erat kaitannya dengan penggunaan kekuasaan (*power*). Dalam prosesnya, Pareto menguraikan bahwasannya ada proses subordinasi, hingga dominasi dalam elit politik (Aminah, 2021). Elite politik yang dikemukakan oleh Pareto dan Mosca selalu identik dengan kuasa dan basis material yang dimiliki (Keller, 1995:12-14).

### **1.5.4 Lokalisasi Kekuasaan**

Lokalisasi kekuasaan ditandai dengan pernyataan Sidel terkait adanya “kekuasaan yang telah bergeser ‘ke bawah’ dan ‘ke atas’ dari sistem yang tersentralisasi di pusat, dapat disimpulkan jika fenomena tersebut dapat meningkatkan kebangkitan

broker-broker lokal (dalam Hadiz, 2022: 90-94). Dengan kata lain, terdapat figur-figur terkemuka yang memiliki kontrol atas sumber daya koersif dan ekonomi, serta mesin-mesin politik lokal. Fenomena lokalisasi kekuasaan bermula pada kejadian di masa Orde Baru yang tatanan pemerintahannya terbilang sangat tersentralisasi dan birokratis. Melalui tatanan pemerintahan tersebut, Orde Baru menciptakan industrialisasi yang cukup pesat dari 1970-an sampai 1990-an. Dengan kata lain, peluang munculnya “orang-orang kuat” atau “bos-bos lokal” sangat kecil. Jika ada sebagian, mereka termasuk berada di bawah sistem patronase politik di bawah kendali Soeharto yang basisnya negara dan aparaturnya. Maka dari itu, Sidel beranggapan bahwasannya dengan jatuhnya Orde Baru akan ada kemungkinan “mafia” dan “jaringan” lokal yang berakar secara birokratis (dalam Hadiz, 2022: 95-96). Berakar secara birokratis dapat digambarkan ketika yang dulunya merupakan bagian penting dari suatu sistem pemerintahan Soeharto, dapat muncul di berbagai wilayah di Indonesia seiring dengan adanya pelemahan kekuasaan negara pusat ke pejabat-pejabat lokal yang terpilih di tingkat kabupaten, kota hingga provinsi.

Ditinjau melalui realita yang ada di Indonesia, kluster yang seringkali muncul di Indonesia yakni politisi-birokrat, pengusaha, perwira militer, hingga gangster yang memiliki relasi dengan organisasi pemuda dan paramiliter. Dengan terhubungnya kluster tertentu dengan organisasi pemuda maupun paramiliter, kepentingan antar kelompok dalam memperebutkan sumber daya semakin dekat dengan tujuan predatorik masing-masing. Baik aktor lama dan relatif baru, basis sosial terkuat yakni dimiliki oleh organisasi-organisasi korporatis hingga sosial. Organisasi sosial dalam berkontestasi akan terlihat paling menonjol untuk memperebutkan kekuasaan lokal dibandingkan dengan aktor-aktor lainnya, disebabkan adanya basis massa oleh masyarakat yang kuat untuk mempertahankan apa yang sesuai dengan pilihannya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwasannya aktor sosial Realitas lokal memperlihatkan bahwasannya kontestasi merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan sumber daya ekonomi dan kekuasaan (Hadiz, 2022: 2). Kontestasi seiring

berjalannya waktu akan mengikuti perubahan sosial yang erat kaitannya dengan perkembangan kapitalisme dan integrasi dalam ekonomi dunia.

Maka dari itu, Sidel lebih menitikberatkan pada mafia-mafia lokal dibandingkan bos-bos lokal dalam menggambarkan kekuasaan politik lokal (dalam Hadiz, 2022: 97). Ditelisik melalui fenomena Orde Baru silam, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di masa kepemimpinan Soeharto sedang masif-masifnya dalam menyuarakan aspirasi dan berjumlah cukup banyak untuk memperjuangkan sumber daya atas kepentingan yang dimiliki antar golongan. Dalam prosesnya, pemerintah beranggapan bahwa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) berpotensi untuk merepotkan laju birokrasi yang berjalan pada saat itu. Permasalahannya, meskipun mobilisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak dapat dijauhkan dari hubungan dengan negara, terdapat potensi calon bos lokal di Indonesia yang memanfaatkan ruang gerak dalam masyarakat sipil. Secara tidak langsung, calon bos lokal berada pada posisi yang bersinggungan langsung antara masyarakat sipil dan negara. Maka dari itu, elemen masyarakat sipil yang menonjol yakni elemen yang sudah terorganisir dan telah dipelihara di bawah sistem kekuasaan yang predatorial, sehingga dapat dikatakan sebagai persimpangan antara masyarakat sipil dan negara (Hadiz, 2022: 99).

## 1.6 Kerangka Teori Konflik Sosial

Dalam penelitian yang berjudul “*Produksi Ruang Ekonomi: Konflik Antar Aktor dalam Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Gresik*”, peneliti menggunakan Teori Konflik Sosial oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Perspektif konflik antar aktor dapat menjadi persoalan politik. Hal ini disebabkan berbagai kelompok kepentingan berlomba untuk memperebutkan sumber daya yang dibutuhkan. Keterlibatan dua orang atau lebih dan terikat dalam isu yang dipertentangkan merupakan isu publik, di mana kepentingan tersebut menyangkut orang banyak, baik negara, pasar hingga masyarakat (Rauf, 2001: 19-20). Pada kasus ini, negara memegang kekuasaan tertinggi mulai dari regulasi, penetapan kewenangan pemerintah, hingga proses administrasi yang membantu sukses

penetapan kawasan, dengan adanya keterlibatan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pasar sebagai pelaku usaha yang dikenal dengan pihak pengembang memiliki sumber-sumber yang akan dijual belikan atas dasar negara sehingga adanya peningkatan keuntungan dalam produksinya. Sedangkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku dan pengguna fasilitas yang telah disediakan.

Kilas balik di abad kesembilan belas tentang pemahaman konflik salah satunya diangkat oleh Karl Marx, di mana awal mulanya beliau mengembangkan analisis politis dan ekonomis ditinjau melalui asumsi bahwasannya konflik merupakan suatu proses yang terelakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini disebabkan oleh konflik yang sifatnya merusak. Marx dalam materialisme dialektikanya menyimpulkan bahwasannya dengan adanya konflik, nantinya akan mendorong konflik yang berkelanjutan dan perubahan selalu tidak dapat dihindari. Secara tidak langsung, Marx mengungkapkan bahwa konflik dapat menimbulkan konsekuensi yang bisa bersifat merugikan maupun menguntungkan. Di sisi lain, Marx juga menganggap salah ketika suatu interaksi harus melibatkan konflik di dalamnya, dikarenakan ketika konflik tersebut sudah terjadi kemungkinan penyelesaian lebih sering dan dapat memuaskan berbagai pihak (Pruitt, 2004: 12-14).

Beranjak dari pemikiran Marx, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z mengartikan konflik sebagai persepsi yang menekankan pada perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Kepentingan didefinisikan sebagai perasaan orang yang menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya ia inginkan, yang memiliki sifat sentral dalam tindakan orang dan pikiran, hingga terbentuklah inti dari banyak sikap, tujuan, hingga niat yang dipertahankannya. Secara tidak langsung, konflik yang diartikan sebagai perbedaan persepsi tentang kepentingan, akan selalu berkelanjutan ketika tidak adanya alternatif yang dapat memuaskan berbagai aktor yang berselisih. Sederhananya, dengan adanya konflik kepentingan yang salah satu pihaknya merasa memiliki prioritas yang lebih utama, maka penyelesaian tersebut sulit didapat (Pruitt, 2004: 21-27). Hal ini digambarkan pada konflik antara

Pemerintah dan Pasar, di mana keduanya memiliki kepentingan untuk pengelolaan tata ruang yang bersifat pembangunan berkelanjutan yang berimplikasi pada sumber pendapatan negara, sedangkan masyarakat memiliki kepentingan akan kesejahteraan sosial masyarakatnya.

Konsep politik memaknai konflik sebagai proses yang di dalamnya mengatur isu publik hingga kepentingan bersama. Pertentangan atas suatu kebijakan yang berasal dari usulan berbagai aktor dijadikan sebagai pemantik untuk menjawab dinamika konflik yang terjadi. Dalam realitanya, kasus tata ruang yang melibatkan berbagai aktor hingga terjadinya konflik, telah menjadi hal yang umum dalam rangka suksesi pembangunan nasional dan menarik berbagai investor untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh negara, terutama dalam penetapan Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam bukunya, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z, menguraikan tiga determinan terkait sumber atau penyebab terjadinya konflik.

Pertama, determinan tingkat aspirasi dapat diartikan sebagai suatu proses ketertarikan seseorang dalam melakukan aspirasi sesuai dengan objek yang dianggap bernilai bagi masing-masing pihak. Aspirasi dapat menimbulkan konflik berdasarkan atas pertimbangan realistis, dan pertimbangan bersifat idealis. Pertimbangan realistis ditandai dengan masing-masing pihak memiliki kepercayaan bahwasannya masing-masing pihak *mampu* untuk mendapatkan suatu objek yang bernilai atau diinginkan. Sedangkan, pertimbangan idealistis digambarkan dengan adanya kepercayaan bahwasannya masing-masing pihak *berhak* untuk memiliki suatu objek yang bernilai atau diinginkan. Melalui kedua pertimbangan di atas, masing-masing pihak juga akan melewati berbagai cara, seperti halnya; prestasi masa lalu (*apa yang telah dicapai*), persepsi mengenai kekuasaan (*sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki*), aturan dan norma (*peraturan perilaku yang diterapkan*), perbandingan dengan orang lain (*cenderung memiliki persamaan dengan kelompok lain/ demonstration effect*) dan terbentuknya kelompok pejuang/ *struggle group* (*melalui persamaan nasib*) (Pruitt, 2004: 28-34).



Kedua, determinan persepsi tentang aspirasi pihak lain, di mana konflik tersebut digambarkan ketika pihak satu dengan pihak yang lainnya memiliki aspirasi dan keinginan yang tinggi, sehingga antar pihak memikirkan siapa yang dapat mencapai aspirasi tersebut. Hal ini disebabkan, aspirasi tidak bisa dicapai oleh kedua belah pihak, dan nantinya akan ada pihak yang sedikit dirugikan dengan pihak lawan. Dengan kata lain, ketika pihak satu menganggap bahwasannya pihak dua cenderung memiliki aspirasi yang rendah atau fleksibel, maka hal tersebut tidak akan dijadikan ancaman oleh pihak satu, sehingga konflik tersebut tidak terjadi. Berdasarkan hal tersebut, sifat ketidakpercayaan kepada lawan pihak secara tidak langsung mendorong timbulnya konflik. Akan tetapi, sifat kepercayaan juga dapat menekan kemunculan konflik melalui pandangan bahwasannya pihak lain secara tidak langsung dapat mengakomodasi kepentingan lawan yang sebenarnya dianggap penting (Pruitt, 2004: 35-37).

Ketiga, tidak adanya alternatif yang dapat diterima semua pihak, digambarkan ketika aspirasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak atau lebih tidak sesuai atau kompatibel dalam perspektifnya. Dengan tidak adanya alternatif persepsi berujung bersifat realistis, seperti halnya adanya keterbatasan dalam memperoleh objek atau menerapkan aspirasi yang diinginkan. Melalui pernyataan di atas, persepsi yang salah tentang keterbatasan diakibatkan oleh *zero-sum thinking*, dimana pihak menggunakan cara berpikir bahwasannya keuntungan saya adalah kerugianmu, demikian juga sebaliknya. Perilaku negatif, yang secara tidak langsung dapat membuat pihak lainnya tidak berkeinginan untuk memberikan keuntungan kepada orang lain—merupakan akibat dari *zero-sum thinking* pula (Pruitt, 2004: 37-39).

Ditinjau melalui kasus ruang dalam perspektif konflik antar aktor, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z menguraikan bahwasannya ketika konflik mengalami eskalasi, akan menimbulkan proses transformasi tambahan dalam eskalasi didukung dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Dalam hal ini, kelima transformasi yang dimaksud, antara lain sebagai berikut:

- a. **Ringan → Berat:** Adanya konflik bereskalasi bermula dengan peralihan usaha yang ringan hingga yang lebih berat. Upaya ringan yang dilakukan mulai dari: *gamemanship*, ingrasiasi, janji, dan argumentasi persuasif. Ketika taktik yang lebih ringan tidak berhasil, dapat dialihkan ke upaya yang lebih berat, seperti halnya: komitmen, ancaman, dan lain sebagainya. Taktik yang lebih berat acapkali memantik timbulnya kekerasan.
- b. **Kecil → Besar:** Pada saat konflik bereskalasi, acapkali isu-isu yang dibawakan sebelumnya mengalami proliferasi atau disebut sebagai perkembangan konflik yang muncul secara tidak langsung. Hal ini dapat mengakibatkan pihak-pihak yang berkonflik semakin menyerahkan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan ekspansi kekuatan, dari kecil hingga besar.
- c. **Spesifik → Umum:** Dalam konflik yang bereskalasi, isu yang sifatnya mendetail dapat berubah menjadi isu umum. Hal ini didasarkan ketika sedang mengalami proses konflik, muncullah permasalahan besar secara tidak langsung dan menyebabkan ketidaktoleransian kepada pihak yang lain.
- d. **Berhasil → menang → menyakiti pihak lain:** Transformasi ini menekankan pada istilah “orientasi individualis” oleh Deutch dalam (Pruitt, 2004: 145), dimana proses awal konflik memiliki tujuan untuk kepentingan diri sendiri, tanpa memperdulikan baik atau buruk hasil yang diterima orang lain. Ketika konflik mulai bereskalasi, kepentingan yang awalnya sederhana menjadi kompetitif. Melalui hal tersebut, akan adanya perubahan tujuan dalam mementingkan aspirasi atas konflik yang dimilikinya, dan berimplikasi pada proses menyakiti orang lain secara tidak langsung.
- e. **Sedikit → banyak:** Konflik ini diawali dengan agitasi, di mana adanya hasutan ditujukan kepada berbagai kelompok, akan tetapi dilakukan oleh sedikit pihak—nantinya dapat menjadi tindakan kolektif ketika salah satu pihak yang berkonflik merasa gagal dalam prosesnya. Hal ini memiliki

tujuan untuk menyatukan persepsi dan berupaya untuk menyelesaikan hingga memenangkan suatu konflik.

Konflik yang telah mengalami eskalasi, akan memiliki kecenderungan untuk terus bereskalasi untuk sementara. Di sisi lain, hanya sebagian konflik yang bereskalasi. Melalui penjelasan tentang transformasi yang dilakukan selama proses eskalasi konflik, juga terdapat penjelasan bahwasannya eskalasi dapat terus berkurang ketika terdapat norma serta lembaga yang berupaya membatasi hingga menjembatani konflik. Dalam proses eskalasi, terdapat tiga model konflik, yakni: model agresor-defender, model spiral-konflik, dan model perubahan struktural. Pertama, Model Agresor-Defender digambarkan melalui kedua pihak yang berkonflik, di mana salah satu pihak bertindak sebagai agresor atau penyerang dan defender bertindak sebagai pihak yang bertahan. Agresor atau pihak penyerang disebut sebagai seseorang yang memiliki sejumlah tujuan atas kepentingan yang dimiliki, dan mengakibatkan adanya keterlibatan konflik dengan pihak lainnya yaitu defender. Secara tidak langsung, agresor didefinisikan sebagai pihak yang melihat adanya suatu kesempatan, sedangkan defender sebagai pihak yang nantinya akan menolak perubahan tersebut.

Kedua, model spiral-konflik, di mana model ini menjelaskan terkait proses membesarnya konflik yang mengalami eskalasi, proliferasi isu, hingga bertambahnya intensitas konflik. Perhatian akan konflik dalam model ini selalu menitikberatkan pada timbulnya isu baru, keluhan baru. Sehingga terjadinya peningkatan krisis terhadap berbagai pihak. Ketiga, model perubahan struktural, di mana ada proses menghasilkan residu dalam konflik dan taktik-taktik yang dipakai. Ketiga model perubahan struktural digambarkan melalui perubahan psikologis, perubahan pada kelompok kolektif, dan perubahan dalam masyarakat dalam pihak yang memiliki konflik.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Pendekatan dan Fokus Penelitian

Penelitian dengan judul “Produksi Ruang Ekonomi: *Konflik Antar Aktor dalam Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di Gresik*” ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan mengenai suatu gejala sosial dan politik dari perspektif berbagai aktor yang tidak dapat disederhanakan secara kuantitatif. Berdasarkan kompleksitas yang terdapat pada penelitian ini - antara konflik perilaku sosial masyarakat, respon pemerintah daerah hingga proses eskalasi konflik di Gresik - tidak dapat disederhanakan ke dalam bentuk variabel-variabel untuk diteliti. Selain itu, penelitian kualitatif nantinya akan menjadikan peneliti untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam *setting sosial* yang menjadi tujuan penelitiannya. Maka dari itu, penelitian ini perlu dilakukan secara mendalam untuk mengetahui lebih jauh mengenai konflik yang terjadi antar aktor dalam penetapan kawasan ekonomi khusus di Gresik.

Dalam buku (Aminah & Roikan, 2019: 53), penelitian kualitatif ditujukan sebagai proses ungkapan makna atas tindakan yang diukur sebelumnya. Penelitian kualitatif erat kaitannya dengan fenomena terdahulu, dan saat ini. Sehingga penelitian kualitatif dapat merelevansikan antara pernyataan dengan fenomena yang ada. Pendekatan kualitatif diterapkan melalui wawancara hingga observasi. Proses interpretasi ditujukan sebagai proses pemahaman terkait subjek yang terdapat pada proses wawancara, dan observasi. Pendekatan kualitatif dalam pelaksanaannya lebih subjektif karena berkaitan erat dengan pola dan perilaku manusia. Oleh karena itu, dalam proses interpretasi data, peneliti bukan hanya melakukan pengambilan data, melainkan juga melakukan penafsiran atas perspektif yang dimiliki. Setiap peneliti memiliki perbedaan dalam penafsiran data, sehingga peneliti juga berupaya untuk merelevansikannya dengan temuan data sekunder yang didapatkan.

Penelitian kualitatif memiliki fokus pada suatu hal yang empiris ditinjau melalui fenomena yang terjadi di masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif, sama halnya memahami subjek berperilaku, dan subyek bersikap terkait topik atas realita yang terjadi. Maka dari itu, peneliti berupaya untuk menerapkan pendekatan kualitatif ditinjau melalui konflik antar aktor atas produksi ruang ekonomi di Kabupaten Gresik. Beragam perspektif oleh pihak yang berhubungan nantinya akan peneliti olah berdasarkan atas interpretasi data.

### **1.7.2 Tipe Penelitian**

Metode yang diterapkan dalam penelitian berjudul “Produksi Ruang Ekonomi: Konflik Antar Aktor dalam Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus JIPE di Kabupaten Gresik”, yakni deskriptif-kualitatif. Dalam buku (Harrison, 2016: 86), metode kualitatif diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk menganalisis sikap politik dan menganalisis perilaku yang tidak dapat diterapkan ketika menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini di dalamnya akan didukung untuk menjelaskan fenomena berdasarkan fenomena yang telah ada sebelumnya. Penyebab konflik masih menjadi pertanyaan disebabkan proses operasionalnya yang belum tinggi, sehingga konflik antar aktor selalu menjadi permasalahan (Aminah & Roikan, 2019: 155).

### **1.7.3 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi yang ditentukan adalah Kabupaten Gresik tepatnya di Kecamatan Manyar. Pemilihan Gresik merupakan hasil analisa peneliti terhadap penelitian, di mana proses konflik yang terjadi, melibatkan massa yang menolak atas penetapan kawasan ekonomi khusus. Melalui aksi massa tersebut, keberadaan pemerintah kabupaten, politisi, hingga perusahaan swasta ikut terlibat.

#### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *in-depth interview* sebagai teknik pengumpulan data nya. Wawancara mendalam atau *indepth interview* didefinisikan sebagai adanya aktivitas wawancara yang berlangsung secara tatap muka, antara informan dengan pewawancara. Dalam proses wawancara akan menggunakan pedoman (*guide*), yang di dalamnya berisikan tentang bahan yang akan dipertanyakan pada saat wawancara, sehingga pelaksanaannya dapat terarah. Kemudian, peneliti menguraikan gambaran umum terkait dengan latar belakang topik yang akan diteliti secara ringkas. Peneliti juga memilih narasumber didasarkan atas keterlibatan beberapa pihak yang berkonflik. Penggunaan teknik wawancara ini ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan pewawancara dalam kehidupan responden sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Teknik penentuan informan dilakukan melalui *snowball*, di mana penelitian dimulai dengan informasi yang minim karena seiring dengan bertambahnya responden, data yang didapat semakin banyak dan dalam. Sumber data nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kualitas penelitian. Menurut (Purhantara, 2010:79), sumber data terdiri dari; sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### 1.7.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Peneliti mengumpulkan data primer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui *in-depth interview* (wawancara mendalam). Menurut Supomo dalam Purhantara (2010:79), data primer lebih akurat karena disajikan dengan lebih jelas. Pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara dari Bupati Gresik selaku pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai kelompok di Gresik, khususnya Forkot Gresik.



**Table 1 Pemetaan Informan**

| No | Jabatan/ Instansi              | Target Data                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dian Palupi (Bappeda)          | Mengetahui pandangan terkait urgensi peralihan Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Gresik, dan mengetahui upaya suksesi peralihan dari daerah ke pusat                                        |
| 2. | Farid (Forkot Gresik)          | Mengetahui bagaimana forkot hadir dalam mengatasi fenomena terkait lahan yang diperdebatkan                                                                                                   |
| 3. | Syahrul Munir (DPRD Komisi II) | Mengetahui pandangan DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat ke pemerintah kabupaten                                                                                                            |
| 4. | Rahman (Dinas Tata Ruang)      | Memperoleh data tata ruang dan mengetahui respon awal dalam penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)                                                                                            |
| 5. | Fuad (Masyarakat Manyar)       | Mengetahui dampak dan pandangan masyarakat lokal, dari perspektif masyarakat awam. Sehingga dapat memetakan kepentingan yang ada pada saat mengatasi masalah tersebut.                        |
| 6. | Adiyana S (Dinas Perijinan)    | Mengetahui terkait permasalahan izin kawasan yang ada. Sehingga penulis dapat membuat parameter, terkait kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan tujuan yang akan direalisasikan. |
| 7  | Mifti Haris (Comdev JIPE)      | Mengetahui terkait proses pengusulan awal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), respon atas tuntutan yang diberikan oleh masyarakat, serta upaya yang dilakukan pasca konflik.                        |

Sumber: Diolah oleh Penulis Berdasarkan Kebutuhan Data



#### 1.7.4.2 Data Sekunder

Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang dapat kita dapatkan dalam berbagai bentuk. Data ini berupa dokumen, jurnal, bukti atau catatan dalam arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Langkah yang perlu ditempuh peneliti menurut Indrianto dan Supomo, antara lain;

- a. Kesesuaian antara periode waktu tersedianya data dengan periode waktu yang diinginkan dalam penelitian
- b. Kemampuan data yang tersedia untuk menjawab masalah atau pertanyaan
- c. Relevansi dan konsistensi unit pengukuran yang digunakan
- d. Kemampuan data yang tersedia untuk menjawab
- e. Kesesuaian antara populasi data yang ada dengan populasi yang menjadi perhatian peneliti.

#### 1.7.5 Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data melalui *in-depth interview* (wawancara mendalam) dengan penentuan informan melalui teknik *snowball*—yang dimulai dengan mewawancarai Bappeda selaku selaku pemangku kepentingan., dan dengan pengumpulan data sekunder baik berupa dokumen, jurnal bukti atau catatan dalam arsip yang dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan. Setelah data primer dan sekunder terkumpul selanjutnya dilakukan kategorisasi, untuk memilah data yang diperlukan dan tidak diperlukan. Karena dalam penelitian kualitatif prosedur penelitian utamanya dalam pengelolaan data, analisa data tidak harus ketika data terkumpul (Hendrarso dalam Suyanto, 2005: 172). Setelah proses kategorisasi data, dilanjutkan dengan tahap penyajian data, di mana data-data yang sudah direduksi tersebut disajikan dalam bentuk naratif karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Tahap terakhir dalam analisa data yaitu penarikan kesimpulan, di mana peneliti berusaha untuk mencari makna yang terkandung di dalam

data-data yang telah disajikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara holistik